

**UPAYA HUKUM KASASI TERHADAP PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN  
PEMBAYARAN UTANG (PKPU) PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 23/PUU-XIX/2021**

**THE LEGAL REMEDY CASSATION ON THE DECISION OF THE DEBT  
PAYMENT OBLIGATION POSTPONEMENT (PKPU) PSOT THE DECISION OF  
THE CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 23/PUU-XIX/2021**

**TABAH PENEMUAN SILALAH**

**NPM                    183112330040296**

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**2023**

**TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI**

Judul skripsi:

**UPAYA HUKUM KASASI TERHADAP PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN  
PEMBAYARAN UTANG (PKPU) PASCA PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 23/PUU-XIX/2021**

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Pada tanggal 2 Maret 2023 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai A dan predikat **Cumlaude**.

Jakarta, 08 Maret 2023

Mengetahui,

  
Dekan  
Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S

  
Pembimbing  
Dr. Ismail Rumadan, M.H.




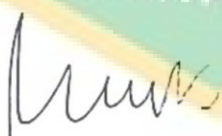
Tim Penguji :

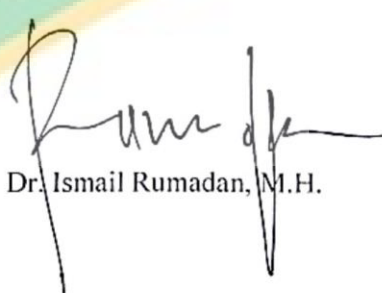
Ketua

Anggota

Anggota

  
Dr. Ummu Salamah, S.Ag.,  
S.H., MA.

  
Dr. Umar Husin, S.H.,  
M.H

  
Dr. Ismail Rumadan, M.H.

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tabah

Penemuan Silalahi Tempat dan Tanggal

Lahir : Paropo, 25

Oktober 1998 Nomor Pokok Mahasiswa

:

183112330040296 Program Studi : Ilmu

Hukum

Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas Nasional

Alamat : Jl. Dewi Sartika No. 41-1, Cililitan Jakarta Timur.

Dengan ini menyatakan yang sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya buat dengan judul "UPAYA HUKUM KASAS TERHADAP PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIDAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 23/PUU-XIX/2021" adalah benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan.

Semua data yang saya gunakan dalam skripsi ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan yang orisinal. Bila kemudian hari, terbukti skripsi ini mengandung plagiasi maka saya bersedia mempertanggung jawabkannya secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari siapa pun.

Jakarta, 01 Maret 2023



## ABSTRAK

Program Sarjana Universitas Nasional Program Studi Ilmu Hukum

Skripsi,... 2023

- A. **Nama Penulis Skripsi** : **Tabah Penemuan Silalahi**
- B. **Nomor Pokok Mahasiswa** : **183112330040070**
- C. **Judul Skripsi** : **UPAYA HUKUM KASASI TERHADAP  
PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN  
PEMBAYARAN UTANG (PKPU) PASCA  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
23/PUU-XIX/2021**
- D. **Jumlah Halaman** : **131 Halaman**
- E. **Isi Abstrak** :

Kewenangan dari pihak kreditor dalam pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dalam praktik sering sekali disalahgunakan oleh pihak kreditor yang tidak beritikad baik sebagai jalan pintas untuk mempailitkan debitornya. Oleh karena itu, PT. Sarana Yeoman Sembada yang diwakili oleh Sanglong alias Samad selaku Direktur Utama, melalui kuasa hukumnya Husendro, S.H., M.H., dkk, melakukan Judicial Review terhadap pasal dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang tidak mengatur upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU yang berakhir pailit. Melalui Putusan Nomor 23/PUU-XIX/2021 Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk membuka ruang adanya upaya hukum kasasi terhadap PKPU yang proposal perdamaianya ditolak oleh pihak kreditor. Eksistensi putusan yang bersifat final dan binding merupakan hal yang sangat progresif dan memaknai ulang bagaimana asas kelangsungan usaha dan prinsip demokrasi ekonomi di Indonesia. Beranjak dari hal tersebut, penelitian ini memuat dalam rangka menganalisis implikasi yuridis Putusan Nomor 23/PUU-XIX/2021 terhadap eksistensi dan esensi lembaga PKPU di Indonesia saat ini dan kedepannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan perbandingan serta dianalisis melalui teknik analisis kualitatif. Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa adapun permasalahan mendasar yang memungkinkan terjadi dalam lembaga PKPU selama ini adalah karena baik kreditor dan debitur sama-sama dapat mengajukan PKPU, sementara yang mengetahui persis keadaan debitur adalah debitur itu sendiri. Di lain sisi putusan PKPU yang berakhir pailit tersebut tidak diperkenankan upaya hukum kasasi sebagai kontrol, dan hal tersebut menghilangkan asas kelangsungan usaha hingga membuat perekonomian yang tidak demokratis. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-

XIX/2021 tersebut membuat upaya hukum yang dapat diajukan oleh Debitor dalam PKPU maupun Kepailitan dapat memenuhi asas kelangsungan usaha, asas keseimbangan antara debitor dengan kreditur, asas keadilan bagi Debitor dan kreditur yang beritikad baik hingga terpenuhinya prinsip demokrasi ekonomi di Indonesia

**Kata Kunci: Kreditor, Debitor, Mahkamah Konstitusi, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.**

**F. Daftar Pustaka :**

1. Buku : 27
2. Peraturan Perundang-undangan : 6
3. Jurnal : 8
4. Makalah/Artikel : 4
5. Skripsi/Thesis/Disertasi : 1
6. Website/Internet : 5

**G. Nama Dosen Pembimbing : Dr. Ismail Rumadan, S.H., MH.**



## ABSTRACT

### National University Graduate Program Legal Studies Program

Thesis, 25 February 2023

A. **Writer's Name** : Tabah Penemuan Silalahi

B. **Student ID Number** : 183112330040296

C. **Thesis Title** : **THE LEGAL REMEDY CASSATION ON THE DECISION OF THE DEBT PAYMENT OBLIGATION POSTPONEMENT (PKPU) PSOT THE DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 23/PUU-XIX/2021**

D. **Number of Page** : 131 Pages

E. **Abstract Contents** :

The authority of creditors in submitting requests for postponement of debt payment obligations (PKPU) in practice is often misused by creditors who do not have good faith as a shortcut to bankrupt their debtors. Therefore, Sarana Yeoman Sembada Inc. who was represented by Sanglong also known as Samad as CEO, through his attorney Husendro, S.H., M.H., et al, conducted a Judicial Review of the article in Law Number 37 of 2004 which does not regulate the legal effort to appeal against the decision of the Postponement of Debt Payment Obligations which ended up bankrupt. Therefore, PT. Sarana Yeoman Sembada, who was represented by Sanglong a.k.a Samad as CEO, through his attorney Husendro, S.H., M.H., et al, conducted a Judicial Review of the article in Law Number 37 of 2004 which does not regulate the legal effort to appeal against the decision of the Postponement of Debt Payment Obligations which ended up bankrupt. Through decision Number 23/PUU-XIX/2021, the Constitutional Court decided to open space for the legal remedy cassation of the postponement of debt payment obligations (PKPU) whose reconciliation proposal was rejected by the creditors. The existence of a decision that is final and binding is a very progressive thing and redefines the principles of business continuity and the principles of economic democracy in Indonesia. Moving on from this, this research contains in order to analyze the juridical implications of Decision Number 23/PUU-XIX/2021 on the existence and essence of debt of payment institutions in Indonesia today and in the future. This type of research is normative legal research, with a statutory, conceptual and comparative approach and analyzed through qualitative analysis techniques. The findings in this study indicate that the underlying problem that has been possible in the debt of payment institution so far is that both creditors and debtors can apply for debt payments, while those who know the

exact situation of the debtor are the debtors themselves. On the other hand, the debt of payment decision that ended in bankruptcy was not allowed to take cassation as a control, and it eliminated the principle of business continuity to create an undemocratic economy. The decision of the Constitutional Court Number 23/PUU-XIX/2021 makes legal remedies that can be submitted by Debtors in debt of payment or Bankruptcy to fulfill the principle of business continuity, the principle of balance between debtors and creditors, the principle of justice for Debtors and creditors who have good intentions and also fulfillment of the principles of economic democracy in Indonesia.

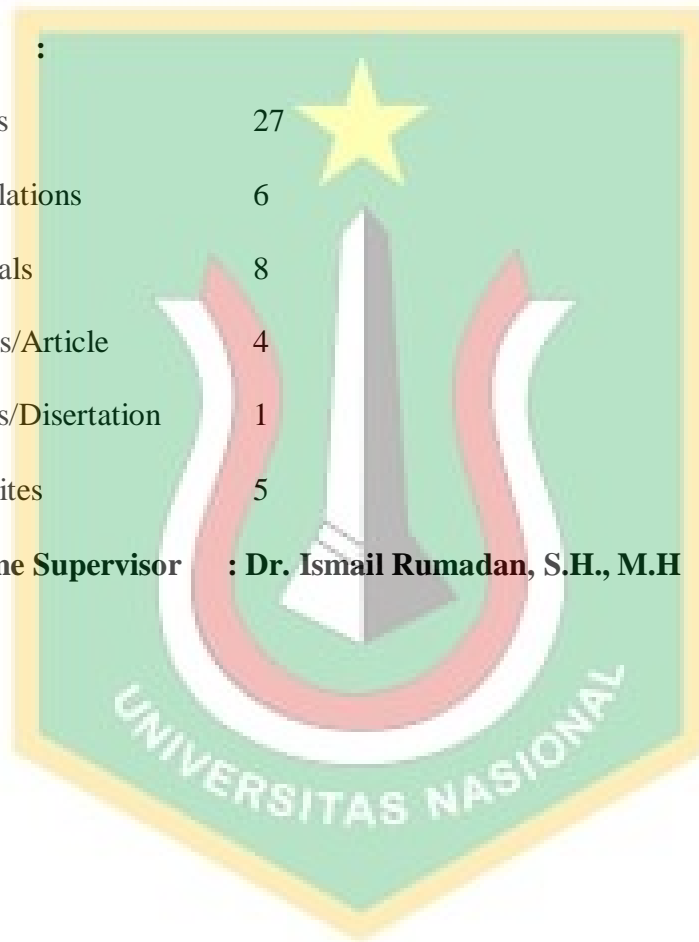
**Keywords: Creditors, Debtors, Constitutional Court, Postponement of Debt**

### **Payment Obligations**

**F. References :**

1. Books	27
2. Legislations	6
3. Journals	8
4. Papers/Article	4
5. Thesis/Disertation	1
6. Websites	5

**G. Lecture Name Supervisor : Dr. Ismail Rumadan, S.H., M.H**



## KATA PENGHANTAR

Segala puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat-Nya serta dengan ijin-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “UPAYA HUKUM KASASI TERHADAP PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 23/PUU-XIX/2021” dalam menempuh studi S1 di Program Ilmu Sarjana Hukum Universitas Nasional dapat saya selesaikan. Penulisan skripsi ini merupakan satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Nasional.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan di dalam penulisan Skripsi ini. Maka dari itu, dengan hati terbuka Penulis menerima saran dan kritik dari semua pihak, agar dapat menjadi perbaikan di masa yang akan datang.

Mengenai penyusunan skripsi ini bukanlah karya pribadi yang terlepas dari sumbangsih dan dukungan dari para pihak. Untuk itu dalam kesempatan yang baik ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A., selaku Rektor Universitas Nasional;
2. Bapak Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional;
3. Bapak Dr. Ismail Rumadan, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi Penulis, dimana Beliau dengan kesabaran dan ketulusannya telah memberikan petunjuk, bimbingan dan arahnya dalam penulisan skripsi ini, dan di sela-sela kesibukannya yang sangat padat, Beliau tetap menunjukkan tanggung jawab akademisnya sebagai Dosen Pembimbing penulis.



4. Bapak Masidin, S.H, M.H, selaku Kepala Program Studi dan Dosen Pembimbing Akademik Penulis yang telah banyak memberikan waktu luang, dan membimbing Penulis sejak Semester 1 sampai dengan Semester 7 serta turut mendukung penelitian skripsi Penulis;
5. Ibu Erma Defiana P, S.H., M.H, selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Perdata Bisnis Fakultas Hukum Universitas Nasional;
6. Bapak dan Ibu Dosen kami pada Program Studi Ilmu Hukum, Program Sarjana Ilmu Hukum, yang telah mengarahkan, memberikan pengajaran dan membagi ilmu pengetahuan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini;
7. Pihak pimpinan dan staf serta segenap civitas akademik program studi Ilmu Hukum Universitas Nasional;
8. Seluruh teman dan sahabat, dan rekan-rekan sesama Mahasiswa pada Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Nasional, yang bersedia dalam berdiskusi dan selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil serta dorongan motivasi dan doa bagi Penulis.
9. Keluarga besar penulis, dari Orang tua dan Saudara-saudara penulis, yang selalu memberi dukungan, semangat, kebaikan yang sangat murni dan selalu mendoakan penulis untuk mencapai tujuan-tujuan dari penulis yang salah satunya adalah menyelesaikan pendidikan S1 di fakultas Hukum Universitas Nasional.
10. Keluarga Besar PT. Farah Jaya terutama Bapak Bian Partawijaya dan Bapak Budiono yang memberi kesempatan untuk penulis menempuh pendidikan di Universitas Nasional ini walaupun dalam sedang bekerja dan tinggal di tempat beliau.
11. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Nasional khususnya angkatan Tahun 2018.

Demikian yang Penulis dapat sampaikan, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus.



Jakarta, 10 Agustus 2022

Tabah Penemuan Silalahi

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... i

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN..... ii

ABSTRAK..... iii

ABSTRACT..... v

KATA PENGHANTAR..... vii

DAFTAR ISI ..... x

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Rumusan Masalah.....9

C. Tujuan Dan Manfaat Penulisan .....9

D. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual .....10

E. Metode Penelitian .....12

F. Sistematika Penulisan .....14

### BAB II TINJAUAN TENTANG DEMOKRASI EKONOMI DAN ASAS

#### KEBERLANGSUNGAN USAHA DI INDONESIA

A. Tinjauan Tentang Demokrasi Ekonomi di Indonesia.....17

B. Tinjauan Tentang Asas Keberlangsungan Usaha (Going Concern) .....	22
--	----

**BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PKPU DAN KEPAILITAN SERTA DATA PENELITIAN TENTANG PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 23/PUU-XIX/2021**

A. Tinjauan Umum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) .....	30
B. Tinjauan Umum Mengenai Kepailitan .....	51
C. Data Penelitian Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 .....	79
1. Posisi Kasus .....	80
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Selaku Penguji .....	80
3. Kedudukan Hukum Pihak Pemohon (Legal Standing) .....	82
4. Norma Dan Alasan Yang Dimohonkan Dalam Pengujian Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 .....	84
5. Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi .....	88

**BAB IV ANALISIS UPAYA HUKUM KASASI TERHADAP PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 23/PUU-XIX/2021**

A.	Proses Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan PKPU Yang Berakhir Pailit.....	90
B.	Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dan Debitur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 .....	93

**BAB IV PENUTUP**

A.	Kesimpulan.....	106
B.	Saran.....	108

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>110</b>
----------------------------	------------



